



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Ni Putu Nonik Sri Darma Yanti¹ Anak Agung Ketut Ayuningsasi²

Article history:

Submitted: 12 Agustus 2022
Revised: 26 Agustus 2022
Accepted: 14 September 2022

Keywords:

Poverty;
Locally-generated revenue;
Unemployment;
Population.

Kata Kunci:

Kemiskinan;
Pendapatan Asli Daerah;
Pengangguran;
Jumlah penduduk.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
nonikyanti123@gmail.com

Abstract

Poverty is a condition of life that is completely lacking experienced by a person or household so that he is unable to meet the needs that are proper for his life. Poverty has become a complex and chronic problem at the national and regional levels so overcoming it requires appropriate and sustainable strategies. The purpose of this study was to analyze the effect of PAD, PDRB, unemployment, HDI, and population simultaneously and partially on poverty in districts/cities of Bali Province. The data used is secondary data in the districts/cities of Bali Province from 2015-2020 sourced from the BPS Provinsi Bali (Central Statistics Agency for the Province of Bali), with a total of 54 observations. The analysis technique used is panel data regression analysis which is then followed by multiple linear regression analysis. Based on the results of data analysis, it is known that PAD, PDRB, unemployment, HDI, and total population simultaneously have a significant effect on poverty in districts/cities of Bali Province. PAD and HDI have no significant effect on poverty, population and unemployment have a positive and significant effect on poverty, and PDRB has a negative and significant effect on poverty in districts/cities of Bali Province.

Abstrak

Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupannya. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis pada tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara simultan dan parsial terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder di kabupaten/kota Provinsi Bali dari tahun 2015-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dengan jumlah pengamatan yaitu sebanyak 54 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. PAD dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik, serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan (Kristin & Darsana 2020). Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan adanya kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara yang diukur dalam jangka panjang dan dilengkapi oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Target dari pembangunan nasional adalah mengurangi tingkat kemiskinan (Putri & Yuliarini, 2013). Kemiskinan merupakan suatu masalah yang menjadi pusat perhatian utama di Indonesia. Kemiskinan dapat dicirikan dengan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas hidup (Jayanti & Sutrisna, 2021). Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu (Estrada & Wenagama, 2020). Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis pada tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan (Iqraam & Sudibia, 2019).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tingkat investasi yang rendah, angka pengangguran yang terlalu tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat (Novriansayah, 2018). Kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin semakin meluas di Indonesia juga disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi permasalahan kemiskinan tersebut (Paramita & Purbadharmaja, 2015). Penyebab dari kemiskinan terungkap dalam teori lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau singkatnya disebut perangkap kemiskinan. Teori ini dikemukakan oleh Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang. Teori ini menyatakan terdapat serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

World Bank mengategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini tidak dengan cepat diatasi, maka akan menyebabkan masalah kesejahteraan dan kerawanan sosial yang nantinya berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Cang & Wu, 2012). Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022) kemiskinan adalah kondisi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah tujuan pariwisata. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Bali, namun Provinsi Bali masih menghadapi masalah kemiskinan. Kondisi ini ditandai dengan masih terdapat masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu, kemiskinan harus segera diatasi oleh setiap daerah khususnya di Provinsi Bali mengingat tingkat kemiskinan merupakan indikator utama dalam keberhasilan pembangunan daerah maupun nasional (Murdiansyah, 2014).

Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2020 masih cukup tinggi yaitu sebanyak 165.850 jiwa. Dari segi jumlah penduduk miskin, Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali yaitu 35.250 jiwa pada tahun 2020, lalu diikuti dengan Kabupaten Karangasem dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24.690 jiwa dan yang mengejutkan Kabupaten Gianyar yang memiliki daerah pariwisata Ubud berada pada urutan selanjutnya dengan jumlah penduduk miskin sebesar 21.010 jiwa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng bahkan mencapai angka 43.430 jiwa, tentu fakta tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten/kota maupun Provinsi Bali.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	15,83	14,53	14,78	14,35	13,55	12,60
Tabanan	24,05	21,90	21,66	19,77	18,74	19,11
Badung	14,40	12,91	13,16	12,97	11,89	13,75
Gianyar	22,89	22,13	22,42	21,26	19,85	21,01
Klungkung	12,11	11,21	11,15	10,43	9,66	8,76
Bangli	12,74	11,66	11,76	11,05	10,08	9,56
Karangasem	30,33	27,12	27,02	26,02	25,99	24,69
Buleleng	43,43	37,55	37,48	35,20	34,26	35,25
Denpasar	20,94	19,17	20,70	20,72	19,83	20,48
Provinsi Bali	196,71	178,18	180,13	171,76	163,85	165,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021

Faktor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah yaitu adanya pendapatan asli daerah yang stabil. Pembangunan nasional membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Anggaran belanja tersebut didapatkan dari berbagai potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah (Wididarma & Jember, 2021). Semakin tinggi PAD, maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh daerah, semakin tinggi peluang untuk mengembangkan ekonomi regional (Supriati, dkk., 2018). Ini berarti PAD memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan (Budi Santosa, 2013).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi dalam jangka panjang dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua orang. Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, diantaranya adalah meningkatnya Produk Nasional Bruto (PNB) pada skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Ariwuni & Kartika, 2019). Menurut Todaro (2002), PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah, baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2016) menunjukkan bahwa apabila tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah mengalami peningkatan, maka akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah.

Salah satu penyebab kemiskinan adalah pengangguran. Penelitian Osinubi (2005) menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka

tingkat kemiskinan juga ikut turun. Pengangguran dapat menimbulkan efek yaitu mengurangi pendapatan dan dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai, dimana semakin turun tingkat kemakmuran, maka akan dapat menimbulkan masalah yang serius yaitu kemiskinan.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan yang masih sulit untuk dihilangkan salah satunya karena kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan pendapatan (Yusuf & Sumner, 2015). Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan dengan melihat sumber daya manusianya. Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, aspek yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan standar pendidikan, derajat kesehatan, dan mutu ekonomi keluarga. Ketiga hal tersebut satu sama lain saling berkaitan, dengan demikian dalam konteks pembangunan SDM, ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh.

Jumlah penduduk adalah salah satu indikator dan menjadi peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Penduduk dapat dikatakan sebagai aset berharga dalam pembangunan yang dapat diberdayakan secara optimal. Jumlah penduduk juga bisa menjadi beban dalam pembangunan apabila dalam pemerdayaannya tidak diiringi dengan peningkatan kualitas yang memadai dalam suatu wilayah tersebut (Usman & Mita, 2018). Jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan suatu daerah merupakan permasalahan mendasar karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan bukti empiris, namun dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendekatan dalam analisis tidak dapat mengungkapkan sebab akibatnya. Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Yunianto, 2021). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang bekerja berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (Adipuryanti & Sudibia, 2015). Di sisi lain, jumlah penduduk juga bisa menjadi masalah bagi pemerintah, karena jika jumlah kelahiran setiap tahun meningkat, maka hal ini akan menambah jumlah penduduk dan ketika penduduk sudah meningkat, maka hal ini akan menyebabkan angka kemiskinan juga ikut bertambah (Azizah dkk., 2018).

Berdasarkan kajian di atas yang menunjukkan kondisi kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara parsial terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi penelitian ini, karena terdapat ketimpangan yang tinggi pada kabupaten/kota di Bali khususnya terkait kondisi kemiskinannya. Selain kemiskinan, obyek dalam penelitian ini berfokus pada PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk. Data kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan data kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali dari BPS pada tahun 2015-2020 yang dinyatakan dengan satuan ribu jiwa. Penelitian ini menggunakan data PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali dari BPS dinyatakan dengan satuan ribu rupiah. Data PDRB dalam penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan kabupaten/kota Provinsi Bali dari BPS yang dinyatakan dengan satuan juta rupiah.

Data pengangguran dalam penelitian menggunakan data pengangguran kabupaten/kota Provinsi Bali dari BPS yang dinyatakan dengan satuan persen. Data IPM dalam penelitian ini adalah data IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali, dan data jumlah penduduk dalam penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Bali dari BPS yang dinyatakan dengan satuan ribu orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi non-partisipan. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini yaitu 54 pengamatan dengan menggunakan data di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2015 hingga 2020 (6 tahun), sehingga diperoleh ukuran sampel adalah $9 \times 6 = 54$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel. Persamaan regresi linear berganda dirumuskan secara matematis sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan
 X_1 = PAD
 X_2 = PDRB
 X_3 = Pengangguran
 X_4 = IPM
 X_5 = Jumlah Penduduk
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
 μ_i = Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data PAD, PDRB, pengangguran, IPM, jumlah penduduk, dan kemiskinan yang sudah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan statistik deskriptif. Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif data dalam penelitian ini.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif

	Kemiskinan (Ribu Orang)	PAD (Ribu Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Pengangguran (Persen)	IPM	Jumlah Penduduk (Ribu Orang)
Mean	19,55	731.000.000,00	16.240,82	2,07	73,60	474,25
Median	19,47	316.000.000,00	14.478,76	1,58	72,33	442,25
Maximum	43,43	4.840.000.000,00	37.335,77	7,62	83,93	962,90
Minimum	8,76	87.731.141,00	3.686,10	0,34	64,68	175,70
Std. Dev.	8,33	1.140.000.000,00	10.330,69	1,72	5,45	228,34
Observations	54	54	54	54	54	54

Sumber: Data Sekunder, 2022

Tingkat kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 19.550 ribu orang dengan standar deviasi 8.330 ribu orang. Tingkat kemiskinan paling rendah (minimum) adalah sebesar 8.760 ribu orang yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 dan tingkat kemiskinan yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 43.430 ribu orang pada Kabupaten Buleleng pada tahun 2015. PAD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 731.000.000.000,00 dengan standar deviasi

Rp.1.140.000.000.000,00. PAD paling rendah (minimum) adalah sebesar Rp. 87.731.141.000,00 yang diperoleh oleh Kabupaten Bangli pada tahun 2015 dan PAD yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar Rp. 4.840.000.000.000,00 pada Kabupaten Badung pada tahun 2019. PDRB memiliki nilai rata-rata sebesar 16.240,82 juta rupiah dengan standar deviasi 10.330,69 juta rupiah. PDRB paling rendah (minimum) adalah sebesar 3.686,10 juta rupiah yang diperoleh oleh Kabupaten Bangli pada tahun 2015 dan PDRB yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 37.335,77 juta rupiah pada Kabupaten Badung pada tahun 2019. Pengangguran memiliki nilai rata-rata sebesar 2,07 persen dengan standar deviasi 1,72 persen. Jumlah pengangguran paling rendah (minimum) adalah sebesar 0,34 persen yang diperoleh oleh Kabupaten Badung pada tahun 2015 dan jumlah pengangguran paling tinggi (maksimal) adalah sebesar 7,62 persen yang diperoleh oleh Kota Denpasar pada tahun 2020. IPM memiliki nilai rata-rata sebesar 73,60 dengan standar deviasi 5,45. IPM paling rendah (minimum) adalah sebesar 64,68 yang diperoleh oleh Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 dan IPM paling tinggi (maksimal) adalah sebesar 83,93 yang diperoleh oleh Kota Denpasar pada tahun 2020. Jumlah penduduk menunjukkan nilai rata-rata sebesar 474,25 ribu orang dengan standar deviasi 228,34 ribu orang. Jumlah penduduk terendah (minimum) sebesar 175,70 ribu orang yang diperoleh oleh Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 dan jumlah penduduk tertinggi (maksimal) 962,90 ribu orang yang diperoleh oleh Kota Denpasar pada tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Tujuan dari analisis data panel adalah untuk menentukan model yang digunakan menganut *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*. Hasil uji *Chow* dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	56.278790	(8,40)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	135.323777	8	0.0000

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai *prob. Cross-section Chi-square* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan metode yang sesuai dalam penelitian ini dan teknik terbaik untuk melakukan uji regresi adalah dengan menggunakan *fixed effects* model. Uji Hausman dilakukan untuk menguji model yang digunakan menganut *fixed effect* atau *random effect*. Hasil uji *Hausman* dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	26.216780	5	0.0001

Sumber: Data Sekunder, 2022

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* sebesar $0,0001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *fixed effect* model. Hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam mengestimasi persamaan regresi penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program *Eviews 10* pada Tabel 5, didapat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -126,73 + 1,96X_1 - 29,66X_2 + 1,31X_3 + 8,24X_4 + 58,57X_5 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y = Kemiskinan (ribu orang)
 X_1 = PAD (ribu rupiah)
 X_2 = PDRB (juta rupiah)
 X_3 = Pengangguran (persen)
 X_4 = IPM
 X_5 = Jumlah Penduduk (ribu orang)
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
 μ_i = *Error Term*

Tabel 5.
Hasil Uji Pengaruh PAD, PDRB, Pengangguran, IPM, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
PAD	1.962750	1.008270	1.946652	0.0586
PDRB	-29.66082	7.802164	-3.801615	0.0005
Pengangguran	1.315513	0.433981	3.031269	0.0043
IPM	8.245185	33.76673	0.244181	0.8083
Jumlah Penduduk	58.57754	14.82785	3.950508	0.0003
C	-126.7398	135.9094	-0.932531	0.3567
<i>R-squared</i>	0.990401	<i>F-statistic</i>		317.4604
<i>Adjusted R-squared</i>	0.987281	<i>Prob (F-statistic)</i>		0.000000

Sumber: Data Sekunder, 2022

Tingkat PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini ditunjukkan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu F_{hitung} sebesar (317,4604) > F_{tabel} (2,41), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai *R-Square* sebesar 0,9904, hal tersebut berarti 99,04 persen variasi (naik turunnya) tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali dipengaruhi oleh variasi (naik turunnya) variabel PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk, sedangkan 0,96 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan analisis data, hasil uji F menunjukkan nilai *probability* yang diperoleh sebesar $0,0000 < 0,05$. Ini berarti tingkat PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil uji t terhadap variabel PAD menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lista dkk. (2021) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan dugaan hipotesis yang menyebutkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Faktor yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah yaitu adanya pendapatan asli daerah yang stabil, karena pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan tetapi tidak langsung dipergunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kurang stabilnya PAD yang dihasilkan pada kabupaten/kota di Bali dan pengalokasian anggaran yang kurang tepat sasaran juga dapat menjadi penyebab kondisi ini. Apalagi kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini yang pengalokasiannya lebih diarahkan bagi kesehatan masyarakat karena terjadi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan PAD tidak banyak mendapat perhatian.

Hasil uji t terhadap variabel PDRB menunjukkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Giovanni (2018) menyatakan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Dalam penelitian Alkamah dkk, (2021) menyatakan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan PDRB yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik memiliki arti bahwa kondisi suatu daerah menuju kondisi perekonomian yang baik. Hal ini akan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut karena PDRB daerah tersebut meningkat yang akan memicu kondisi perekonomian masyarakat di daerah tersebut dapat bekerja dan memperoleh pendapatan yang cukup sehingga akan mengurangi kemiskinan.

Hasil uji t terhadap variabel pengangguran, menunjukkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Wenagama (2017) yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Ninggrum & Natha (2017) juga menyatakan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Karangasem. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang secara langsung. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kehilangan suatu pekerjaan adalah penurunan kualitas standar kehidupan (Leonita & Sari, 2019). Pengangguran dapat menimbulkan efek yaitu mengurangi pendapatan dan dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai, dimana semakin turun tingkat kemakmuran, maka akan dapat menimbulkan masalah yaitu kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah terbesar yang dihadapi sebagian besar negara di dunia saat ini, baik negara maju atau berkembang. Keduanya merupakan hambatan untuk kemajuan sosial dan menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material (Akwara & Akwara, 2013). Angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat akan dapat menambah beban perekonomian yaitu perlunya perluasan lapangan pekerjaan. Jika lapangan pekerjaan yang baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja, maka akan menambah barisan pengangguran yang sudah ada (Agustina dkk., 2018).

Angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali akan meningkat karena ketika kurangnya lapangan pekerjaan dengan minimnya jumlah lowongan yang dibuka tetapi berbanding terbalik dengan jumlah daftar pencari kerja, sehingga pemerintah diharapkan dapat menambah program dan kegiatan dalam upaya memperluas kesempatan kerja. Pemerintah juga sebaiknya memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan *skill* yang dimiliki oleh tenaga kerja, sehingga penduduk yang masuk sebagai kategori tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam hal ini pengangguran perlu ditekan agar kemiskinan tidak semakin meningkat.

Hasil uji t terhadap variabel IPM menunjukkan secara parsial IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Edfrida (2019) yang menyatakan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Syaifullah & Malik (2017) yang menyatakan IPM memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4. Itu artinya bahwa peningkatan IPM di ASEAN-4 yang digambarkan oleh ketiga aspek yakni indeks harapan hidup di ASEAN-4 belum menyentuh rakyat miskin secara keseluruhan. Selain itu, kondisi pendidikan di negara-negara ASEAN-4 hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang kaya dan pada umumnya belum mampu dirasakan oleh rakyat miskin secara keseluruhan. Penyebab lainnya yaitu standar hidup layak di ASEAN-4 masih sangat rendah di kalangan rakyat miskin.

IPM merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Nurcholis, 2014). Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk dapat hidup layak.

Dalam meningkatkan IPM diperlukan komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan pendidikan kesehatan dan bidang ekonomi. Pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan. Selain itu, kesehatan merupakan syarat dalam meningkatkan produktivitas, karena dengan kesehatan, pendidikan mudah dicapai. Dalam hal ini, kesehatan dan pendidikan merupakan komponen penting pembangunan ekonomi dalam membantu mengurangi kemiskinan. Dengan pendidikan dan kesehatan maka pendapatan tinggi akan mudah didapat. Begitu sebaliknya dengan pendapatan tinggi, maka akan mudah mengeluarkan dana untuk kesehatan dan pendidikan (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk memacu pertumbuhan ekonominya dengan memprioritaskan pelayanan prima dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi.

Hasil uji t terhadap variabel jumlah penduduk menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dkk, (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Menurut penelitian Mustika (2011) menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Jumlah penduduk yang besar dalam pembangunan suatu daerah merupakan permasalahan mendasar karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Sebagian besar penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan bukti empiris, namun dalam pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendekatan dalam analisis tidak dapat mengungkapkan sebab akibatnya. Setiap tahunnya jumlah penduduk di suatu wilayah selalu mengalami penambahan sesuai dengan tingkat kelahiran. Jumlah penduduk bisa menjadi masalah bagi pemerintah, karena jika jumlah kelahiran setiap tahun meningkat, maka hal ini akan menambah jumlah penduduk dan ketika penduduk sudah meningkat, maka hal ini akan menyebabkan angka kemiskinan juga ikut bertambah (Azizah dkk, 2018).

Peningkatan penduduk pada suatu wilayah umumnya akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jika jumlah penduduk meningkat maka akan menyebabkan banyaknya jumlah penduduk (Damanik & Sidauruk, 2020). Dalam hal ini perlu adanya upaya dalam menurunkan pertumbuhan penduduk misalnya dengan lebih mengencangkan program KB bagi masyarakat. Program KB mulai dicanangkan pada tahun 1971. Oleh karena itu, pengaruh program KB dalam penurunan tingkat fertilitas sangat penting untuk mengurangi jumlah penduduk maka penerapan KB diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan jumlah anak sehingga seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi (Mustika, 2011).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Variabel PAD, PDRB, pengangguran, IPM, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, hal ini berarti bahwa apabila jumlah penduduk meningkat maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, hal ini berarti bahwa peningkatan pengangguran akan menyebabkan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali juga meningkat. IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, hal ini berarti bahwa apabila IPM meningkat maka kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali akan menurun. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, hal ini berarti bahwa apabila PDRB meningkat maka kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali akan menurun.

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan meningkatkan lagi dalam memanfaatkan PAD dalam penyediaan infrastruktur ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga setiap daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tetap dan merata dengan daerah-daerah yang berkembang cepat. Pemerintah dapat membuat kebijakan atau lebih mendukung usaha-usaha kecil yang berpotensi meningkatkan PDRB di Provinsi Bali guna membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Bali sebaiknya lebih memperluas kesempatan kerja. Dalam meningkatkan IPM diperlukan komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan pendidikan kesehatan dan bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai IPM di Provinsi Bali dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk memacu pertumbuhan ekonominya dengan memprioritaskan pelayanan prima dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dalam hal ini perlu adanya upaya dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk misalnya dengan lebih mengencangkan program KB bagi masyarakat. Penerapan KB diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan jumlah anak sehingga seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Selain itu pertumbuhan penduduk diiringi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain yang menunjang kualitas hidup masyarakat.

REFERENSI

- Agustina, E.S., Nur., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4 (2) hal. 1-19.
- Akwara, Azalahu F dan Akwara Ngozi F. (2013). Unemployment and Poverty: Implications for National Security and Good Governance in Nigeria, *International Journal of Public Administration and Management Research (IIPAMR)*, 2 (1), pp. 2-3.
- Alkamah, Author Muhammad, Bahar Sinring, Dahlia Baharuddin. (2021). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4 (1), hal. 552-563.
- Ariwuni, Made Ade Dwi dan I Nengah Kartika (2019). Pengaruh PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 8 (12) hal. 2927 – 2958.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFPE Yogyakarta.
- Azizah, Elda Wahyu, Sudarti, Hendra Kusuma, (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (1), hal. 167 – 180.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

- Budi Santosa. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 (2), hal. 134-135.
- Cang, Juin – Jen dan Wu, Chi – Hsin. (2012). Crime, Job Searches, And Economic Growth. *International Atlantic Economic Society*, 40 (1), Pp. 1-20.
- Damanik, R. & Sidauruk, S. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), hal. 358-368.
- Darmawan, Agus Pande dan I Wayan Wenagama. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 6 (10) hal. 1868-1895.
- Dollar, D. and Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3) pp. 195–225.
- Edfrida, Uray Maulidia. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*. 7 (4).
- Estrada, A. A. Eriek dan I Wayan Wenagama. (2020). Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal Ep Unud*, 8 (7) hal. 1637- 1665.
- Giovanni, Ridzky. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development analysis journal*, 7 (1), hal. 23-31.
- Iqraam, Mohammad dan I Ketut Sudibia (2019). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesempatan Kerja, dan Persentase Penduduk Sektor Informal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8 (7) hal. 1443 – 1472.
- Jayanti, Ida Ayu Surya Krisna dan I Ketut Sutrisna. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Infrastruktur, dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10 (2) hal. 686 – 715.
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economic Education*, 4 (2), hal. 192-209.
- Kristin, Ayunita dan Ida Bagus Darsana. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 9 (6) hal. 1373 – 1401.
- Lista, Ernadhi Sudarmanto, & Dessy Helisnawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Unpak*. 6 (3), hal 1-13.
- Leonita, L & Sari, R.K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3 (2), hal. 1-8.
- Murdiansyah, Isnani. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang), *Jurnal Wiga*, 4 (1), hal. 71-92.
- Mustika, Candra (2011). Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1 (4) hal. 12-23.
- Ningrum, Ni Kadek Kartini Dwi Cahya dan I Ketut Suardhika Natha. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 6 (4) hal. 597-621.
- Nurcholis, Muhammad. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12 (1) hal. 45-57.
- Osinubi, Tokunbo Simbowale. (2005). Macroeconometric Analysis of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria. *Pakistan Economic and Social Review*. XLIII (2), pp. 249-269.
- Paramita, A.A.I.D & Purbadharmaja, I.B.P. (2015). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4 (10), hal. 1196-1218.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin, dan U. Sulia Sukmawati. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), hal. 217 – 240.
- Putri, I.A Septyana Mega dan Ni Nyoman Yuliarmi. (2013). Beberapa Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2 (10) hal. 441-448.
- Supriati, LMS Kristiyanti, M. Hajir. (2018). Improving Regional Original Income With Tax Receipt, Regional Retribution And Regional Wealth Management Results In Solo Raya. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR)*. 2 (3), pp. 11-26.
- Syaifullah, A. dan Malik, Nazarudin. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1 (1), pp. 107-119.
- Todaro, Michael P. (2002). *Pembangunan Ekonomid di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Usman, U. & Mita, D. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2), hal. 9-15.
- Wididarma, Komang dan Made Jember. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 10 (7) hal. 2982 – 3010.
- Yunianto, Dwi. (2021). Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Forum Ekonomi*. 23 (4), pp: 687-698.
- Yusuf, Arief Anshori dan Sumner, Andy. (2015). Growth, Poverty, and Inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3), pp. 323-348.